

Pemberantasan PKI Di Kediri (1966 – 1968)**Dhany.T.Saputra**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : dhany.17040284034@mhs.unesa.ac.id

Sumarno

S1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: sumarno@unesa.ac.id

Abstrak

Partai Komunis Indonesia pasca pemberontakan Madiun 1948 banyak merombak kebijakan dan struktur organisasinya. Kebanyakan dari pemuka Partai Komunis ini adalah pemuda dibawah 30 tahun. Salah satunya adalah Dipa Nusantara Aidit, seorang tokoh golongan muda yang turut serta dalam peristiwa rengasdengklok, yang mendorong diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Pada puncak kejayaannya di awal tahun 60-an, Partai Komunis sudah memiliki basis masa yang cukup besar bahkan menjadi Partai Komunis terbesar ke-3 di dunia, apalagi pada masa itu Presiden Soekarno dengan jelas mendongkrak tiga ideologi besar menjadi sebuah kesatuan dengan konsepnya yakni Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis). Akan tetapi di tahun 1965, terjadi gesekan antara pihak militer dengan Partai Komunis yang menyebabkan partai tersebut beserta para pendukungnya harus dihabisi. Yang kemudian mengharuskan Indonesia memulai babak baru dengan rezim yang baru pula. Di Kediri, proses pemberantasan terjadi begitu luas, akan tetapi sangat sedikit orang yang mau dimintai keterangan mengenai proses pemberantasan. Sumber penelusuran kami sebagai peneliti banyak didapatkan dari penuturan tokoh agama dan militer setempat. Dalam keterangannya, tokoh-tokoh ini tidak ingin namanya dicantumkan dalam penulisan kali ini. Hasilnya, kami menemukan fakta bahwa pada pemberantasan partai komunis kali ini diarahkan untuk melakukan pembunuhan massal (Mass Genocide) sehingga ketetapan berikutnya mengenai pembubaran partai tidak memunculkan gerakan baru yang serupa.

Kata Kunci : Pemberantasan, Komunis, Kediri**Abstract**

Remnants of the Communist Party that joined ACOMA (Youth Communist Movement) made a showoff to attract more masses for the 1955 election. The one who came out to attract more affiliators is Dipa Nusantara Aidit. He comes from remains youth figures who joins the proclamation in 1945, 10 years earlier. In early 60s, Communist party became the 3rd biggest communist party in the world following Soviet Union and Peoples Republic of China, with about a half milion followers all over Indonesia. At this time, Soekarno as the president introducing the NASAKOM propaganda, which stands for Nationalist, Religion, and Communist. But, in the late 1965 a coup that resulted the eradication of the communist party happened. This eradication was ordered throughout Indonesia. Their followers are murdered and their leader executed. This led Indonesia to the new regime, called New Order. In Kediri, during Eradication of the communist party there are much witnesses to talk, but they won't introduce their names publicly due to the psychological trauma. The result from this research is the society led to made a mass genocide to make sure the parliamentary decree of abolition of the communist party did not lead to a new movement in future.

Keywords: Eradication, Communist, Kediri

PENDAHULUAN

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya diberantas pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Pemberantasan dan pembubaran tersebut dilatarbelakangi oleh insiden berdarah di Jakarta dan Jogjakarta yang menewaskan 6 orang petinggi Angkatan Darat di Jakarta, 2 orang petinggi Angkatan Darat di Jogjakarta, Seorang perwira menengah Angkatan Darat, dan seorang polisi berpangkat brigadir. Insiden berdarah tersebut dikenal sebagai Gerakan Tiga Puluh September atau G30S. Sehari kemudian, 1 Oktober 1965, gerakan tersebut segera disusul oleh serangkaian aksi pembalasan. Mayjen Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), memimpin aksi pembalasan tersebut. Manuver Soeharto ini kemudian dikenal sebagai Gestok (Gerakan Satu Oktober)¹. Istilah-istilah semacam Gestapu, Cestok, dan G30-S/PKI bukan hanya penting sebagai petunjuk adanya dua fase yang berbeda atas rangkaian peristiwa yang terjadi, atau sebagai istilah pembeda antara kelompok politik yang memenangkan kontlik dan mereka yang kehilangan kekuasaan, tetapi juga sebagai wacana akademis tersendiri. Istilah-istilah tersebut, di kemudian hari, mempengaruhi pola-pola interpretasi dan analisis historiografi.

Dalam penelitian ini akan dibahas terkait peristiwa pemberantasan PKI di Kediri dan bagaimana hasil akhirnya. Penelitian ini juga ditujukan untuk menjawab permasalahan mengenai pembangunan tugu dan gapura di Kediri. Sebelumnya, pernah berlaku pemberantasan serupa tepatnya tahun 1948 saat gerombolan Musso melakukan berbagai macam aksi sepihak di wilayah madiun. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab bagaimana pemerintah meneguhkan orde baru di wilayah-wilayah terpencil. Penelusuran serupa yang lebih spesifik membahas kasus perkebunan tebu dan pabrik gula pernah dilakukan oleh salah seorang sejarawan nasional bernama Hermawan Sulistyono berjudul "Palu Arit Di Ladang Tebu".

Untuk lebih terarah dan agar pembahasan ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini perlu diberikan batasan dalam penulisannya. Adapun pembatasan dalam pembahasan awal penumpasan di tahun 1966 dan akhir penumpasan di tahun 1968. Tahun 1966 menjadi awal kekuasaan Orde Baru yang memiliki wewenang penuh atas tuntutan rakyat dalam Tritura. Di tahun 1966 inilah komando dari pemerintah pusat terhadap daerah mulai disebar, tidak hanya di wilayah Jakarta dan Yogyakarta saja. Tetapi hampir merata di seluruh wilayah di Indonesia khususnya di pulau Jawa. Tahun 1968, dimulailah pembangunan atas tugu-tugu yang dapat kita saksikan di depan rumah-rumah warga di wilayah Kediri sebagai penanda bahwa pemberantasan telah berakhir dan juga sebagai

pengingat bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah mutlak menjadi falsafah negara, tidak ada yang lain.

Dari pembatasan masalah di atas saya menemukan 3 masalah utama dalam penelitian ini. Pertama, apa alasan dilakukannya pemberantasan anggota PKI di Kediri. Kedua, bagaimana proses pemberantasan anggota PKI di Kediri. Dan ketiga, mengapa setelah pemberantasan anggota PKI dilakukan kemudian banyak dibangun gapura dan tugu Pancasila di kawasan Kediri Raya saja.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sejarah. Menurut Suryabrata dalam Metode Penelitian (1994: 16) tujuan penelitian historis untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat, semua upaya tersebut harus melalui proses pengumpulan data yang pada penelitian ini kami himpun secara kualitatif.

Metode itu sendiri berarti cara, jalan, atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Metode disini dapat dibedakan dari metodologi adalah Science of Methods yakni ilmu yang membicarakan jalan. Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Abdulrahman, Apabila tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lampau maka metode yang di gunakan adalah metode historis. Metode yang bertumbun pada empat langkah kegiatan: Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Histiografi.

Tahapan pertama adalah heuristik, dimana dilakukan pengumpulan data primer, maupun sekunder yang ditemukan di berbagai sumber. Adapun sumber yang saya gunakan berasal dari sumber berupa E-book, buku – buku yang membahas komunisme seperti karya John Rossa, koran dan majalah seperti *New York Times*, dan buku – buku lain yang membahas mengenai kesaksian dari para penyintas pemberantasan anggota PKI di Indonesia. Selain menggunakan studi kepustakaan, sumber penelitian juga diperoleh dari wawancara dengan tokoh – tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut maupun tokoh saksi mata dari peristiwa pemberantasan tersebut. Tokoh yang diwawancarai antara lain adalah mantan anggota Kodim 0809 Kediri, anggota GP Ansor, dan beberapa tokoh masyarakat. Untuk memperoleh data tambahan mengenai penyebaran tugu dan gapura Pancasila juga dilakukan kegiatan observasi di beberapa tempat yang memiliki tugu dan gapura Pancasila serta simbol – simbol ideologis lain di Kediri Raya.

Tahapan selanjutnya adalah kritik sumber, peneliti

¹ Istilah ini dinyatakan sebagai versi "resmi" pada 1966-1967. Preferensi Soekarno untuk menggunakan istilah Gestok kemudian dilarang karena berhubungan dengan gerakan balasan Soeharto. Lihat penggunaan istilah ini oleh Soekarno dalam Gerakan 30

September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994), hlm. 151.

melakukan verifikasi untuk menguji keabsahan sumber yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kritik ekstern serta intern. Untuk proses kritik ekstern, peneliti menggunakan penuturan dari tokoh masyarakat dan sesepuh GP Ansor dan mencocokkannya dengan sumber dari Kodim 0809 untuk menemukan jalan tengah dan informasi yang benar. Untuk kritik intern, peneliti melakukan perbandingan antara sumber yang diperoleh dari wawancara dengan sumber pendukung agar bisa memperoleh fakta sejarah yang benar.

Setelah proses verifikasi / kritik sumber dilakukan, tahap yang dilakukan selanjutnya adalah interpretasi. Dalam tahap ini peneliti melakukan perbandingan data untuk menafsirkan peristiwa sejarah agar serasi dengan permasalahan yang diteliti.

Historiografi atau Penulisan sejarah merupakan pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan, dan menjadi tahap terakhir dari penelitian sejarah, setelah melalui fase heuristik, kritik sumber dan interpretasi yang kali ini kami tulis dalam bentuk skripsi yang disusun secara sistematis, logis, kronologis, dan sesuai kaidah karya ilmiah. Pada tahap terakhir inilah penulisan atas rangkaian sejarah yang sudah diinterpretasikan kemudian dijadikan satu peristiwa yang runtut sehingga kejelasan tentang sejarah yang ditulis, yakni mengenai Pemberantasan PKI di Kediri tahun 1966-1968 ini menjadi lebih terang dan jelas. Saya menyebut ini sebagai *Puzzling*. Dengan kata lain penulisan sejarah kali ini merupakan representasi kesadaran penulis sejarah dalam masanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menindaklanjuti gejolak yang terjadi di wilayah pusat, maka dibutuhkan koordinasi antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan problematika yang rumit seperti halnya tuntutan dalam tritura. Sinergi tersebut diwujudkan dalam rangka pemberantasan sebuah partai yang sudah berdiri bahkan sebelum Indonesia merdeka. Hal ini tentu memerlukan strategi khusus supaya partai tersebut benar-benar tak bersisa. Akan tetapi, ketidaksetujuan Presiden dalam usulan pembubaran partai merupakan salah satu faktor macetnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam menyikapi tuntutan Tritura tersebut. Idealisme Presiden akan konsep Nasakom harus diruntuhkan guna mempermudah operasi pemberantasan ini. Maka dari itu, digantikannya kursi parlemen Partai Komunis oleh Angkatan Darat mengantarkan DPR/MPRS pada pembacaan laporan pertanggungjawaban Presiden pada sidang umum ke-IV mereka pada tanggal 22 Juni 1966. Laporan pertanggungjawaban yang diberi nama

“Nawaksara” tersebut tidak cukup kuat untuk meyakinkan parlemen untuk mempertahankan Soekarno sebagai Presiden/Panglima Tertinggi yang kemudian secara cepat mengikis kepercayaan rakyat atasnya. Kejatuhan Soekarno sebagai Presiden tentunya bukan semata-mata karena keinginan pihak militer untuk melakukan pemulihan keamanan, akan tetapi karena kepercayaan rakyat telah jatuh kepada pihak militer untuk juga melakukan pemulihan secara politik dan ekonomi. Keadaan ini jugalah yang sebelumnya memaksa sang Presiden menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang kemudian menjatuhkan tongkat komandonya kepada Menteri/Panglima Angkatan Darat (Menpangad) kala itu, Mayjen Soeharto.

A. Perintah Operasi Pemberantasan

Ditandatanganinya dokumen Supersemar oleh Presiden Soekarno berarti memberi kepercayaan penuh kepada Pangkostrad Mayjen Soeharto untuk melakukan tindakan pemulihan keamanan dan ketertiban di wilayah pusat dan daerah. Meskipun sebelumnya juga pernah diberlakukan perintah dari Menpangad yang juga dijabat oleh Mayjen Soeharto mengenai Ruang Yudha² di wilayah Aceh pada tanggal 14 Oktober tahun 1965³. Di wilayah Jawa Timur sendiri, Operasi memang diperintahkan beberapa hari setelah peristiwa G30S meletus. Masyarakat luas sudah mengetahui bahwasanya G30S adalah gerakan kontra Revolusioner⁴ dari siaran radio pemerintah. Akan tetapi, terbelengkalinya koordinasi dari pusat mengharuskan pasukan untuk tetap diam ditempat hingga ada perintah lebih lanjut. Dalam operasi pemulihan keamanan ini, TNI-AD bekerjasama dengan CIA⁵ untuk mengusut anggota PKI hingga ke akarnya. Namun, pada perkembangan selanjutnya bukan hanya Anggota PKI saja, akan tetapi juga simpatisan dan afiliator termasuk organisasi *underbouw* dari partai ini juga masuk ke dalam daftar oknum atau organisasi yang akan diberangus dalam operasi kali ini.

Keadaan TNI-AD yang kocak-kacir pasca G30S juga menjadi kendala dalam melaksanakan operasi ini. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya simpatisan dari Partai Komunis di kubu angkatan bersenjata. Sebagian besar dari kelompok Angkatan Darat memang sangat memusuhi PKI, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya simpatisan dan afiliator dari partai ini. Bantuan dari CIA kemudian mempermudah lingkungan militer untuk mengidentifikasi siapa saja afiliator dan simpatisan Partai Komunis di tubuh Angkatan Darat sehingga operasi pemberantasan di daerah-daerah sepenuhnya bisa dijalankan pasca ditandatanganinya

² Berdasarkan Instr-1/10/1965 Yang memerintahkan KODAM I untuk membawa peralatan perang NON-KONVENSIONAL dengan menggunakan konsep pertempuran teritorial yang dengan serta menggandeng masyarakat dalam operasi pemberantasan pihak-pihak yang terlibat dalam “GESTOK”.

³ Jess Melvin, *The Army and The Indonesian Mass Genocide Mechanics of Mass Murder*, hlm. 194

⁴ SP-02/10/65, HU-02/10/65, DP-02/10/65

⁵ CIA (*Central Intelligence Agency*) adalah Badan Intelijen Amerika Serikat yang ditugaskan di wilayah negara lain untuk memantau situasi dan kondisi politik negara tersebut. Agen-agen CIA sering dipergunakan oleh kelompok pro AS untuk membantu menumbangkan lawan politik yang dianggap berbahaya bagi eksistensi pengaruh Amerika Serikat atas wilayah negara tersebut.

Supersemar pada 11 Maret 1966.

Koordinasi yang dilakukan dengan baik antara pusat dan daerah dalam hal ini memang karena Mayjen Soeharto waktu itu memegang penuh kendali pemerintahan dalam hal pemulihan keamanan dan ketertiban. Kebijakan awal Menpangad Mayjen Soeharto adalah melakukan pemberantasan terhadap petualang-petualang yang dinamakan dengan Gerakan 30 September⁶. Pemberantasan ini diharapkan dapat berkoordinasi dengan elemen masyarakat khususnya organisasi-organisasi islam seperti NU dan Muhammadiyah beserta Organisasi-Organisasi di bawahnya.

Pada masa Orde Baru, jabatan bupati tidak terlalu bermuatan politis dibandingkan masa Orde Lama. Pada 1950-an hingga 1960-an, seorang bupati selalu merupakan hasil penunjukan politis oleh partai politik yang terkuat di daerah tersebut. Di Jombang dan Kediri, bupatinya selalu orang NU atau yang ditunjuk oleh NU. Tetapi, dibandingkan daerah lain, termasuk Kediri, jabatan bupati di Jombang lebih bermuatan politis karena seorang bupati harus bersaing dengan pemimpin berbagai pesantren yang ada di kawasannya dan manajemen PG.

Bupati dan walikota di Kediri dan Jombang hampir selalu ikut campur, dan kerap kali secara langsung, dalam persoalan-persoalan PG. Misalnya, dalam sewa-menyewa tanah rakyat. Lahan pertanian, dengan demikian, menjadimedan konflik kepentingan yang melibatkan PG, penguasa daerah, petani, pemerintah di tingkat propinsi, bahkan pemerintah pusat. Dalam skenario yang khas, petani terjebak dalam situasi kontraktual dengan PG terlepas apakah mereka menghendaki kontrak tersebut atau tidak. Dalam kasus-kasus penolakan petani untuk menyewakan tanahnya kepada PG, penguasa daerah "terlibat" (eufemisme netral bagi "dominasi" atau "pemaksaan"). Dengan menggunakan kekuatan koersif birokrasi, mereka memaksa petani untuk menerima kontrak sewa tanah yang seringkali merugikan⁷. Keterlibatan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghalangi siasat partai Komunis yang menginginkan pemerataan hak atas tanah warga, yang dimana hal seperti itu akan menjadikan pemasukan daerah menjadi sedikit. Hal ini memicu berbagai macam pergolakan secara politis salah satunya adalah pembunuhan ulama dan santri di sebuah masjid di wilayah Kanigoro dan beberapa pesantren disekitarnya oleh Barisan Tani Indonesia, salah satu organisasi underbouw PKI.

B. Proses Operasi Pemberantasan

⁶ Sumber: Rekaman Mayjen Soeharto pada prosesi pengangkatan jenazah korban G30S di Lapangan Halim Perdanakusumah, 4 Oktober 1965.

⁷ Hermawan Sulistyono. 2000. *Palu Arit di Ladang Tebu*. Jakarta: Kepustakaan Gramedia, hlm. 92-93

⁸ Surat Pelelrada Jatim no. AX-Sukep/65.027/Pepelrada, ditandatangani oleh Letkol Susilo, perwira yang mengkoordinasi PG di Jatim pada tanggal 22 November 1965.

Di wilayah Kediri, warga masyarakat mulai melakukan aksi pada bulan Desember 1965. Yang sebelumnya ditandai dengan Pernyataan Kodam Jawa Timur pada tanggal 22 November 1965 yang mengatakan bahwa seluruh pekerja yang diduga terlibat Gestapu harus dipecat atau diberhentikan untuk sementara, dan mereka yang kena skorsing hanya akan menerima 50 Persen gaji, baik dalam bentuk kontan atau dalam bentuk barang selain tunjangan kesehatan bagi mereka sendiri atau yang menjadi tanggungannya, yang akan ditentukan oleh atasan mereka⁸.

Ada sebagian kelompok yang menggunakan pakaian hitam beranggota 5-10 orang yang tidak seorangpun diantara mereka menggunakan senjata api. Mereka hanya membawa celurit, parang, atau benda-benda tumpul lainnya. Benda tumpul berupa pisa berwujud alat yang paling efektif dan tidak menyakitkan. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terlihat membawa 10-20 orang terduga simpatisan dan afiliasi dari PKI dengan tangan terikat ke belakang. Selama prosesi berlangsung, jarang ada korban yang melawan. Kelompok-kelompok tersebut kemudian pergi ke tepi sungai untuk melakukan eksekusi. Unikny, kelompok-kelompok ini secara pribadi tidak saling mengenal satu sama lain. Tetapi sebagian dari mereka mengenali pemimpin anggota kelompok lain. Eksekusi dilakukan dengan cara korban diperintahkan untuk berlutut, lalu dihabisi⁹.

Sungai Brantas merupakan tempat dimana laporan menyatakan bahwa ratusan hingga ribuan mayat terapung dan sebagian besar tanpa kepala. Akan tetapi, kebenaran ini belum terbukti sehingga Presiden Soekarno memerintahkan pembentukan Komisi Pencari Fakta untuk mengetahui kondisi langsung di lapangan. Pada tanggal 3 Januari 1966, Kolonel Willy Soedjono, seorang komandan resor 081 yang bermarkas di Madiun menuturkan bahwa berita pembantaian liar dan mayat-mayat terapung di sungai Brantas tidak sesuai pada kenyataan. Dan pada tanggal 15 Januari 1966, Presiden mengumumkan bahwa ada 87.000 orang telah terbunuh¹⁰.

Pada tanggal 12 Februari 1966, Kolonel Willy Soedjono mengumumkan bahwa pemakaian seragam Organisasi massa atau partai politik tidak diijinkan. Perintah ini ditujukan untuk menghilangkan kesan bahwa Angkatan Darat-lah yang melakukan pembantaian dan untuk mengawasi konflik yang tengah terjadi¹¹. Aktifitas lain yang dibatasi adalah upaya menggerakkan massa, melakukan kampanye atau mengibarkan bendera partai tertentu, dan membentuk organisasi baru.

Pembantaian terus terjadi hingga Agustus tahun 1966.

⁹ Wawancara dengan seorang tokoh Agama pada tanggal 20 Januari 2021. Identitas dirahasiakan.

¹⁰ *The New York Times* Edisi 16 Januari 1966.

¹¹ Pengumuman No.006/Peng/7/1966 Oleh Dandim 0809 Kediri tanggal 5 Juli 1966.

Eksekutornya adalah golongan yang lebih muda kala itu. Tujuannya adalah sebagai salah satu bentuk peralihan dari remaja menuju dewasa (Rite of Passage). Eksekusi yang dilakukan oleh para pemuda ini terbilang lebih manusiawi daripada sebelumnya. Akan tetapi, para terduga haruslah menggali kuburnya sendiri sebelum dilakukan eksekusi. Sama seperti sebelumnya, terduga afiliasi dan simpatisan lah yang menerima ini. Setidaknya, ada 75 persen pengurus partai termasuk afiliasi dan simpatisan lenyap¹². Pada bulan Mei 1966, kelompok-kelompok kunci dibantu oleh para pemimpin GP Ansor dan Tentara berpangkat rendah melakukan ronda rutin untuk mengamankan situasi dan kondisi di wilayah-wilayah yang memiliki banyak korban. Tugas mereka adalah mengawasi anak-anak, sifatnya lebih informal dan memiliki fasilitas yang sangat minim. Anak-anak tersebut memang terdorong untuk melakukan pembantaian terhadap terduga anggota PKI. Dorongan tersebut berasal dari teman-teman di lingkungan tempat tinggal mereka. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, mereka mengaku pusing dan mual. Mereka terkadang membawa telinga, alat kelamin, atau jari korban sebagai pembuktian kepada lingkungan bahwa mereka pemberani¹³. Pada bulan yang sama, Kolonel Willy mengumumkan pembentukan organisasi KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Tujuan mereka adalah sebagai pesaing dari organisasi mahasiswa PKI, CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia). Akan tetapi pada praktiknya mahasiswa dan anggota organisasi ini justru malah menghancurkan toko-toko di Jalan Dhaha dan menyerang orang-orang Tionghoa selama kurun waktu Juni hingga Agustus 1966. Disaat yang sama, pemimpin berbagai organisasi kemahasiswaan seperti HMI, IMM, GMNI, PMKRI, dan PMII mulai menunjukkan tanda-tanda persaingan antar organisasi, dan KAMI adalah wadah bagi mereka sebagai bentuk dukungan terhadap rezim yang baru.

C. Pasca Operasi Pemberantasan

Sejak Agustus 1966, RPKAD yang bersaing dengan KKO mengambil alih pembersihan terhadap anggota partai yang tersisa. Bermodalkan data CIA, RPKAD melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh yang berpengaruh di wilayah Jawa Timur khususnya Kediri untuk diinterogasi guna kemudian ditahan atau dieksekusi. Mayjen Soemitro, Panglima Kodam Brawijaya saat itu ditugaskan untuk memperkenalkan Letjen Soeharto diantara pemimpin Angkatan Darat di Jawa Timur. Selain itu, tugas Pangdam Brawijaya adalah menjaga keseimbangan antara KKO dan RPKAD yang bersaing dengan ketat di Jawa Timur dan menghentikan pembantaian massal oleh warga masyarakat. Hanya sebagian kecil dari anggota PKI yang tersisa selama pemberantasan tersebut. Pemberantasan secara struktural

juga sudah selesai, dan pabrik-pabrik bekerja seperti semula. Pada bulan November 1966, semua aktifitas pemberantasan dan pembersihan telah berakhir. Akan tetapi, guna mengantisipasi terjadinya tindakan yang tidak diinginkan, maka organisasi-organisasi yang berguna untuk menyaring tenaga kerja seperti yang terjadi di PG Mrican yang dibentuk setahun sebelumnya tetap dipertahankan. Selain itu, PG Cukir dan PG Pesantren sebagai salah satu pabrik gula terbesar juga tetap mempertahankan tim tersebut guna mengantisipasi tindakan-tindakan sepihak yang pernah dijalankan oleh BTI dan BPI, organisasi *underbouw* PKI¹⁴.

Kebijakan ini mengakibatkan turunnya produktivitas pabrik-pabrik gula. Bulan Juni hingga September 1966 merupakan masa-masa yang sulit karena sedikitnya pasokan tebu dari rakyat. Selain itu, kualitas tebu yang jelek karena disimpan selama proses pemberantasan juga menjadi salah satu faktor menurunnya produktivitas pabrik gula. Kemudian pada akhir 1966, setidaknya ada 42 orang pekerja dan 2 orang anggota dewan perusahaan PG Mrican diketahui merupakan simpatisan Partai Komunis dan menerima pemecatan secara langsung dari perusahaan. Setelahnya, semua buruh yang sebelumnya tergabung dalam Serikat Buruh Gula PG Mrican membubarkan organisasi tersebut dengan meninggalkannya begitu saja. Setelah kejadian ini, Laporan akan adanya penjarahan dan pengrusakan ladang-ladang tebu milik warga terdengar oleh pihak keamanan. Tindakan ini disinyalir merupakan tindakan sepihak yang dilancarkan oleh anggota Partai Komunis yang beberapa kali pernah melakukan sabotase. Tindakan ini berlangsung setidaknya hingga tahun 1968.

Pada tahun 1967, wilayah Kediri sudah memasuki tahap pemulihan dan konsolidasi sosial. Pada bulan Januari, para elit partai komunis yang tersisa dipindahkan ke Markas Kodam Brawijaya di Surabaya untuk mendapatkan vonis terkait statusnya terhadap Partai dan dukungannya pada Gerakan 30 September. Meskipun gejolak-gejolak ringan seperti konflik antara petani tebu dengan terduga simpatisan PKI, akan tetapi situasi di lapangan masih dapat dikendalikan. Pada bulan Mei 1967, Kodam Brawijaya melancarkan operasi intelijen ke seluruh wilayah di Jawa Timur, tak terkecuali di Kediri. Hal ini ditujukan untuk menyisir wilayah-wilayah yang sebelumnya berstatus "Zona Merah" untuk kemudian mendapat sosialisasi mengenai rezim baru yang berkuasa. Tujuan utama dari operasi ini adalah guna menyisir sisa-sisa anggota Partai Komunis yang diduga tengah menghimpun kekuatan untuk melakukan counter terhadap peristiwa pemberantasan sebelumnya. Oleh karenanya, dengan operasi ini diharapkan siapapun yang bersimpati dengan Partai Komunis tidak lagi memberikan dukungannya terhadap partai ini.

¹² Hermawan Sulistyono. 2000. *Palu Arit di Ladang Tebu* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. hlm. 200.

¹³ Wawancara dengan H. M (Wates), tanggal 21 Januari 2021, narasumber mengaku melakukan tindakan tersebut saat masih duduk di kelas 2 Sekolah Menengah Pertama.

¹⁴ Wawancara dengan alm. MN tanggal 15 Januari 2021, alm. MN adalah salah satu petani tebu yang mengirim hasil panennya ke PG Mrican dan PG Pesantren selama tahun 1966-1971.

Rezim baru dengan kebijakan “Massa Mengambang” melarang segala macam aktivitas politik di wilayah pedesaan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendepolitisasi massa supaya tidak muncul konflik-konflik serupa di kemudian hari. Di daerah perbatasan dengan Blitar seperti Kandat, Ngancar, dan Wates, konsentrasi bekas anggota Partai Komunis tersebar luas. Keadaan lingkungannya sangat mendukung untuk merancang ulang strategi bagi kaum Komunis. Tujuannya sederhana, yakni melakukan gerilya. Massa yang telah berkumpul di titik tersebut kemudian bergerak ke arah Blitar guna mengamankan diri dari pihak militer. Akan tetapi, intelijen militer terlebih dahulu melacak keberadaan mereka. Sisa-sisa anggota Partai Komunis ini diberantas di wilayah Blitar selatan¹⁵.

Tap MPRS no.XXV/MPRS//1966 tentang pembubaran Partai Komunis beserta seluruh kegiatan organisasinya dan pelarangan penyebaran paham Marxisme-Leninisme semakin memperkuat posisi masyarakat dalam memerangi kaum komunis dan memberantasnya hingga ke akar. Bagaimanapun, karena Tap MPRS tersebut adalah sumber hukum tertinggi maka TNI pun wajib mengakui dan mempertahankan ketetapan tersebut supaya ideologi komunis tidak lagi tumbuh subur.

Pemberantasan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Kediri ini tidak lepas dari pertimbangan atas basis massa yang besar, dimana sebelumnya Kediri juga pernah menjadi medan perlawanan tentara merah selama pemberontakan di Madiun. Kediri dipertimbangkan sebagai sasaran pemberantasan utama di Jawa Timur dikarenakan banyak diantara warganya yang masih berafiliasi dengan Partai Komunis semasa Presiden Soekarno masih berkuasa. Tidak sedikit pula simpatisan dari Partai Komunis khususnya dari barisan buruh pabrik gula dan para petani. Selain itu, di rumah-rumah warga banyak terdapat potret-potret Bung Karno yang berarti masih banyak simpatisan sang proklamator di wilayah tersebut. Alasan lain adalah adanya peristiwa pembunuhan kyai dan santri di Masjid At-Taqwa Kanigoro. Sentimen anti-komunis yang begitu di masyarakat terlebih atas dorongan Banser-Ansor pasca G-30S mengakibatkan proses pemberantasan berjalan cepat. Banyak rumah warga yang diduga simpatisan dikepung untuk dibunuh dan diarak keliling kampung. Warga yang selamat dari kepungan Banser dan penangkapan oleh pemerintah memilih pergi dan menetap di tempat lain.

D. Pembangunan Gapura Pancasila-UUD 1945

Pasca pemberantasan PKI di wilayah Kediri, bekas rumah-rumah terduga afiliator dan simpatisan yang masih dihuni dipasang tugu semacam gapura bertuliskan Pancasila dan UUD 1945. Hal serupa juga ditemukan di jalan-jalan sekitaran Kediri Raya hingga Jombang. Hal ini dimaksudkan agar penduduk sekitar menjadi peka akan asas tunggal Pancasila yang memang dipromosikan oleh pemerintah bersamaan dengan Gerakan Pramuka dan Program Keluarga Berencana. Selain itu, banyak pos tentara dan kamling

dibangun sebagai upaya pengawasan atas perilaku brutal warga masyarakat terhadap para terduga afiliator dan simpatisan. Hal ini menandakan kewaspadaan pemerintah terhadap perlawanan yang pernah terjadi sebelumnya.

Setiap gapura yang tersebar di hampir seluruh wilayah di Kediri merupakan tanda bahwa Kodam Brawijaya benar-benar mengkampanyekan orde baru di wilayah ini. Pada tahun 1968, setiap rumah harus memiliki identitas nasional dengan memasang gapura-gapura dengan format sebelah kiri berlogo Jawa Timur dengan tulisan Pancasila di bagian kanannya, di bagian bawahnya bertuliskan nama desa dan pahatan tangan dua yang melambangkan kampanye Keluarga Berencana milik Orde Baru. Format sebelah kanan berlogo lambang Kabupaten/Kota Kediri dengan tulisan UUD 1945 di bagian kirinya, di bagian bawahnya bertuliskan nama kecamatan dan pahatan tunas kelapa yang melambangkan gerakan pramuka.

Tujuan lain dari pemasangan gapura tersebut adalah untuk gencar mempromosikan kampanye rezim baru untuk pemilu 1971 mendatang. Pembangunan dipusatkan di kebun atau rumah yang sebelumnya memiliki hubungan dengan Partai Komunis. Seiring berjalannya waktu dan semakin kuatnya pengaruh Orde Baru, maka pembangunan gapura tersebut tidak lagi berpatok pada rumah-rumah mantan anggota partai. Warga yang merasa bahwa gapura tersebut lebih bagus dipasang dirumahnya kemudian banyak yang meminta untuk memasangkan gapura tersebut di depan rumahnya juga.

Sebenarnya pemasangan gapura ini ada di seluruh wilayah di Jawa Timur. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu orang mulai merobohkan gapura tersebut dan menggantinya dengan yang lebih modern. Di wilayah Kediri jauh lebih spesifik dimana hal ini berlangsung hingga akhir masa Orde Baru. Di wilayah Kabupaten Kediri masih banyak didapati gapura-gapura tersebut. Semakin ke kota, semakin sulit menemukannya. Bukan tanpa alasan, wilayah kota yang lebih maju membuat warga masyarakat semakin meninggalkan budaya memasang gapura.

PENUTUP

Kesimpulan

Perjalanan Partai Komunis yang telah lebih dari 45 tahun, melintasi ruang dan waktu, masa-masa kemerdekaan yang manis telah berakhir dengan malang. Sekitar 500.000 orang telah dihabisi, sesama anak bangsa saling bunuh demi mengukuhkan kekuasaan yang kelak bertahan dengan sebutan Orde Baru. Oleh sebab itu, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ; Pertama , Pemberantasan PKI di Kediri tidak lepas dari peristiwa Gerakan 30 September yang terjadi di pusat. Pemberantasan yang terjadi merupakan instruksi yang dijalankan per tanggal 14 Oktober 1965 hingga usai pada bulan November tahun 1967. Kedua, Tentara atau pihak militer mendapat

¹⁵ Wawancara dengan Kapten R, tanggal 20 Januari 2021.

Instruksi dari pusat untuk melakukan tindakan pemulihan keamanan dan ketertiban dalam rangka memenuhi tuntutan Trikora di daerah-daerah, sehingga keterlibatan pihak militer dalam operasi ini memang sangat diperlukan demi meminimalisir jumlah korban yang ada. Ketiga, Dalam perkembangan selanjutnya, pihak militer mengeluarkan keputusan untuk membatasi segala bentuk keterlibatannya dengan cara membatasi pengerahan massa sehingga kesan bahwa tentara mengorganisir atau memobilisasi massa bisa terkendali sehingga tentara hanya memiliki kesan sebagai pengawas dalam operasi ini. Keempat, Organisasi masyarakat membentuk kelompok yang terdiri dari 5-10 anggota untuk melakukan eksekusi terhadap Anggota Partai beserta simpatisan dan afiliator. Wilayah yang biasa digunakan untuk melakukan pemberantasan adalah di tepi sungai Brantas dan beberapa lubang pembantaian yang dibuat di beberapa titik. Kelima, Pada akhir masa pemberontakan, Tentara mulai mengorganisir pasukan untuk menjaring para petinggi Partai Komunis yang masih tersisa untuk dilakukan interogasi dan penahanan karena terlibat dalam insiden G30S. Para remaja memberantas anggota partai yang tersisa sebagai *rite of passage* sebelum mereka beranjak dewasa. Keenam, Pasca pemberantasan partai komunis dan penetapan keputusan pembubaran partai beserta atribut dan aktivitasnya pada 5 Juli 1966 melalui Tap MPRS no. XXV/MPRS/1966, maka dengan ini berakhirlah sudah segala aktivitas partai komunis yang ada di daerah-daerah. Ketujuh, Pada tahun 1967, seiring dengan maraknya tindak kriminal yang dilakukan secara sepihak oleh kelompok massa yang merasa dirugikan atas pemecatan oleh pabrik-pabrik gula yang menyaring pegawai yang mendukung G30S maka muncul gerakan pembubaran serikat buruh pabrik gula sebagai bentuk pembuktian bahwa oknum-oknum yang ada di dalamnya tidak terlibat dalam tindak kriminal yang terjadi. Kedelapan, Di tahun 1968, sehubungan dengan dekatnya pemilu tahun 1971, maka pemerintah melalui Kodam Brawijaya melakukan introduksi akan adanya rezim baru kepada seluruh wilayah di pelosok Jawa Timur. Pengenalan rezim baru ini ditandai dengan dibangunnya tugu dan gapura-gapura di setiap rumah yang dilambangkan dengan logo provinsi-kabupaten beserta Pancasila-UUD 1945. Hal ini pula menandai berakhirnya dominasi Partai Komunis di wilayah Kediri dan meneguhkan ideologi Pancasila sebagai bentuk dasar tunggal yang tidak dapat

dirubah dengan cara apapun. Pembangunan tugu dan gapura-gapura ini berlangsung hingga akhir masa Orde Baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Surat Kabar

The New York Times. 1966. *Sukarno reports killing of 87,000: Says they were slain after Communist Coup failed*. Edisi 16 Januari 1966. Singapura

B. BUKU

1. Abbas, Anwar. 2008. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam Pergaulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*. Jakarta:LP3M STIE Ahmad Dahlan.
2. Anto, M. B. Hendrie. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta:Ekonisia.
3. Majid, Dien, Johan Wahyudi. 2014. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta:Prenada Media Group.
4. McNamara, Robert. 1989. *Out of the Cold: New Thinking for American Foreign Policy in the 21st Century*. London: Bloomsbury.
5. Melvin, Jess. 2017. *The Army and The Indonesian Genocide: Mechanic of The Mass Murder*. New York:Routledge.
6. Roosa, John. 2008. *Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*. Jakarta:Hasta Mitra.
7. Sjamsudin, Helius. 2016. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta:Penerbit Ombak.
8. Sulistyono, Hermawan. 2000. *Palu Arit di Ladang Tebu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

C. Skripsi

Zakiya, Isna. 2019. *Peran GP Ansor dalam Penumpasan PKI di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun 1965*. Skripsi. Fakultas Adab dan Humaniora, Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.